

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM BPJS DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT

Rezeki Aulia Ramadhani¹, Dini Sintia², Sukma Khairani Sihombing³, Fitriani Pramita Gurning⁴

rezekiaulia28@gmail.com¹, dinisintiapr@gmail.com²

UIN Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan yang memiliki hak dalam menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS menjalankan prosedur Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasar pada pilar kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan analisis yaitu untuk mendapati bahwa program BPJS kesehatan efektif dalam mengoptimalkan mutu kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menganalisis artikel terbitan 5 tahun terakhir. Skema pencarian artikel bersumber dari database online yaitu Google Scholar, dan Sinta dengan menggunakan metodologi literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah BPJS Kesehatan di Indonesia berjalan dengan baik di beberapa rumah sakit dan puskesmas di Indonesia. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapannya di beberapa rumah sakit dan puskesmas. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan optimalisasi dan evaluasi dalam penerapan BPJS Kesehatan di pelayanan kesehatan termasuk, puskesmas dan rumah sakit di Indonesia.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, Implementasi, Pelayanan kesehatan.

ABSTRACT

The Social Security Administering Body (BPJS) is a body that has the right to administer social security. BPJS carries out National Social Security System (SJSN) procedures based on the pillars of humanity, benefits and social justice for all Indonesian people. The aim of the analysis is to find that the BPJS health program is effective in optimizing the quality of health in Indonesia. The research method used is by analyzing articles published in the last 5 years. The article search scheme comes from online databases, namely Google Scholar and Sprott using a literature review methodology. The results of this research are that BPJS Health in Indonesia is running well in several hospitals and health centers in Indonesia. However, there are still obstacles in implementing it in several hospitals and health centers. Therefore, the government needs to optimize and evaluate the implementation of BPJS Health in health services, including community health centers and hospitals in Indonesia.

Keywords: *BPJS of Health, Implementation, Health service.*

PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Sosial yang dimaksud sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu pilar untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) menentukan lima jenis program jaminan sosial, yaitu program Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiunan (JP), dan Jaminan Kematian (JKM), yang diselenggarakan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan transformasi dari BUMN penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan. Pada tanggal 25 November 2011, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan beberapa asas yakni: asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu yang menjadi mitra dari program BPJS Kesehatan ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pemberi fasilitas pelayanan kesehatan dasar sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilaksanakan di rumah sakit. Maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang berada pada unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Kesehatan merupakan faktor yang penting bagi kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri setiap orang ingin hidup dalam keadaan yang sehat. Hal itu dikarenakan dengan tubuh yang sehat secara jasmani dan rohani, manusia dapat hidup dan melakukan aktifitas sehari-hari. Selain itu dengan tubuh yang sehat seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik secara sosial maupun ekonomi. Agar kesehatan setiap orang terjaga, negara perlu ikut ambil bagian dalam mengatur, membina dan mengawasi. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan apa yang menjadi hak seseorang, agar hak tersebut dapat dipenuhi maka hal tersebut lebih ditegaskan lagi pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara jelas menyatakan tentang hak hidup seseorang, yaitu:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, selain itu orang juga berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hal tersebut dimaksudkan supaya setiap orang dapat mempertahankan hidupnya dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

Untuk dapat mencapai terwujudnya hak hidup seseorang, maka diatur lagi secara lebih khusus pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”, yang dimaksud dalam pasal tersebut dimaksudkan supaya seseorang memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Kesehatan masyarakat merupakan bidang antardisiplin, yang melibatkan ilmu-ilmu seperti epidemiologi, biostatistika, ilmu sosial, dan manajemen pelayanan kesehatan. Subbidang lainnya yang dianggap penting di antaranya kesehatan lingkungan, kesehatan komunitas, kesehatan jiwa, ekonomi kesehatan, kebijakan kesehatan, penyuluhan kesehatan, politik kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, disabilitas, masalah gender dalam kesehatan, serta kesehatan seksual dan reproduksi. Kesehatan masyarakat, bersama dengan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan suatu negara

secara keseluruhan. Kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui surveilans penyakit dan indikator kesehatan, serta melalui promosi perilaku hidup sehat. Perilaku umum yang diinisiasi kesehatan masyarakat di antaranya promosi mencuci tangan, menyusui, vaksinasi, pencegahan bunuh diri, penghentian merokok, pemahaman tentang obesitas, meningkatkan aksesibilitas kesehatan, dan distribusi kondom untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular seksual. Ada perbedaan yang signifikan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan dan inisiatif untuk melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat antara negara maju dan negara berkembang, serta di antara sesama negara berkembang. Di negara-negara berkembang, infrastruktur kesehatan masyarakatnya masih terbentuk mungkin tidak tersedia cukup tenaga kesehatan yang terlatih, sumber daya keuangan, atau dalam beberapa kasus, pengetahuan untuk memberikan pelayanan medis dan pencegahan penyakit tingkat dasar. Masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara-negara berkembang adalah kesehatan ibu dan anak yang buruk, yang makin diperburuk oleh malnutrisi dan kemiskinan.

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat telah mempromosikan kesehatan dan memerangi penyakit di tingkat populasi. Dalam masyarakat pra-industri yang kompleks, intervensi-intervensi yang dirancang untuk mengurangi risiko yang mengancam kesehatan sering kali diinisiasi oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti penguasa, jenderal militer, atau pemuka agama. Britania Raya merupakan negara yang memulai pengembangan kesehatan masyarakat sejak abad ke-19, karena Britania Raya merupakan negara urban modern pertama di dunia. Inisiatif kesehatan masyarakat awalnya berfokus pada sanitasi (misalnya sistem pembuangan limbah di Liverpool dan London), pengendalian penyakit menular (misalnya vaksinasi dan karantina), serta pengembangan berbagai ilmu pengetahuan, misalnya statistika, mikrobiologi, epidemiologi, dan ilmu-ilmu teknik. Pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan suatu struktur multidisiplin, bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam upaya perawatan kesehatan, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab agar tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal dengan pemanfaatan tenaga, sarana, dan prasarana, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.

Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu rumah sakit, yang ikut berperan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh, terjangkau dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sarana dan prasarana yang lengkap bukanlah segalanya dalam memenangkan persaingan pasar, namun juga harus dapat memberikan kinerja dalam bentuk pelayanan yang baik terhadap pasien, dimana hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang handal dan profesional dengan tanggungjawabnya masing-masing, diharapkan fungsi dan tujuan rumah sakit dapat tercapai. Keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang berperan serta dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Dilihat dari segi jumlah perawat secara keseluruhan mendominasi tenaga kesehatan yang ada, dimana seorang perawat memberi kontribusi yang unik terhadap pelayanan kesehatan sebagai komponen yang relatif, berkelanjutan, koordinatif dan advokatif. Keperawatan merupakan profesi yang menekankan kepada bentuk pelayanan profesional sesuai dengan standar dan kaidah etik serta moral sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Perawat juga merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang bertanggung jawab membantu pasien, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Pemberian bantuan ditujukan untuk pemenuhan

kebutuhan dasar pasien guna tercapainya kondisi kesehatan yang optimal.

Pelayanan keperawatan adalah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang sangat menentukan kualitas pelayanan, karena keperawatan memegang peranan strategis, dimana sebagian besar tenaga kesehatan adalah perawat yang memberikan asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan yang bermutu dapat diperoleh salah satunya adalah tergantung dari jumlah yang seimbang antara tenaga perawat yang ada dengan beban kerjanya di rumah sakit. Beban kerja seorang perawat sangat membutuhkan waktu untuk dapat diselesaikan dari seluruh tindakan keperawatan yang harus dikerjakan. Posisi perawat berada di jajaran terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di rumah sakit, karena selama 24 jam secara terus menerus dituntut untuk menjadi figur yang harus selalu fokus dan bersimpati, serta perhatian kepada pasiennya. Beban kerja perawat terdiri dari kegiatan produktif dan non produktif yang berlebih, hal itu disebabkan karena selain tugas keperawatan, perawat terkadang juga melaksanakan tugas-tugas non keperawatan. Beban kerja perawat juga dipengaruhi oleh waktu kerjanya, dengan banyaknya pekerjaan ataupun tindakan yang harus dilakukan oleh seorang perawat, dengan demikian seorang perawat membutuhkan seorang asisten perawat yang memiliki kualitas dan kinerja yang profesional.

Pelayanan kesehatan merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Perlindungan hukum ini mengatur antara hak dan kewajiban, dimana mengatur hubungan hukum atas hak dan kewajiban sebagai asisten perawat, yaitu hubungan hukum untuk memperoleh hak pekerjaan yang layak dan kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan batasan kewenangan asisten perawat. Artinya, dalam hal ini mengatur hubungan hukum antara asisten perawat dengan pemerintah yang memberikan pekerjaan dan kewenangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah studi literatur review, yaitu suatu studi yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis berdasarkan dari berbagai literatur yang telah dipilih dan dari sumber-sumber ilmiah sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan dan bahkan dapat menjadi sebuah gagasan-gagasan baru. Untuk mengumpulkan hasil penelitian, dilakukan penelusuran literatur dengan menggunakan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya dan merupakan artikel lengkap. Sampel penelitian yang digunakan di peroleh melalui pencarian google scholar, dan sinta dengan menggunakan kata kunci pelayanan kesehatan, BPJS, dan implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan, di dapatkan hasil bahwa:

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Hasil Penelitian
1	Hasrillah, Yaqub Cikusin & Hayat (2021)	Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program BPJS Kesehatan	Dari hasil penelitian dilapangan bahwa Implementasi Program BPJS dipuskesmas Kedungkandang belum optimal, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan lagi. Pengajuan klaim BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungkandang pada rekapitulasi pelayanan belum dilakukan secara menyeluruh

			<p>dan terpadu, pengisian dan pencatatan pada status rekam medis untuk kelengkapan dokumen klaim diserahkan kepada petugas rekam medis, belum terjalin kordinasi dan kerja tim yang baik, antara perawat dan petugas rekam medis. Selain dari itu pengetahuan masyarakat yang minim tentang pengajuan klaim kepada pihak puskesmas, sehingga seringkali terjadi perdebatan antara peserta dan pihak puskesmas. Ada sebagian masyarakat yang masih bingung dengan program BPJS, sebagai peserta BPJS untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kedungkandang.</p>
2	<p>Irna Permata Sari, Fauzi Arif Lubis, & Khairina Tambunan (2024)</p>	<p>Analisis Efektivitas Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Di Labuhanbatu Utara, BPJS telah dilaksanakan se efektif mungkin. Namun pelaksanaannya kurang berhasil karena masyarakat secara keseluruhan belum terbujuk untuk mendaftar sebagai peserta BPJS. Perlunya peran dari pemerintah untuk meningkatkan jangkauan masyarakat sehingga lebih banyak orang yang mendaftar JKN.</p> <p>Tidak ada fasilitas atau infrastruktur di meja registrasi untuk mendukung staf dan memungkinkan mereka untuk memberikan layanan lebih efisien, seperti pengeras suara untuk meningkatkan pendengaran peserta. Selain itu, jaringan internet yang lamban, khususnya di loket BPJS, sehingga menyulitkan pihak layanan untuk memvalidasi data peserta BPJS miliknya yang tersimpan di area kerja kantor.</p> <p>Terkadang terjadi ketidakseimbangan antara jumlah peserta dan jumlah pegawai. Misalnya, ada 3 pegawai di loket pendaftaran dan 2 di loket BPJS, namun pegawai juga bertanggung jawab mengantarkan daftar peserta ke pelayanan kesehatan selain mendaftarkan nama pasien(Silvia & Lubis, 2023).</p>
3	<p>Wenny Djuarni, Dadi Mulyadi & Titien Agustina (2021)</p>	<p>Analisa Kinerja Pelayanan Publik Bidang Kesehatan pada Pelaksanaan Program BPJS Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan personil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam pelayanan administrasi, barang maupun jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan administrasi telah dilakukan sesuai dengan kewajiban hak penerima layanan. - Memberikan penjelasan dan tata cara pelayanan jasa kepada penerima pelayanan dan penerima pelayanan melaksanakan dengan tertib - Menerima dan merespon informasi yang

			disampaikan oleh penerima layanan untuk mendapatkan kesepakatan keputusan yang diambil pelayanan jasa - Konsumen/pasien sabagai penerima layanan di berikan barang dan informasi penggunaan barang sesuai dengan tanggungjawab , sesuai dan aturan yang berlaku
4	Mifta Nurzannah, Nurhamidah, Loviga Ananda Carolina Br Purba, & Fitriani Pramita Gurning (2022)	Implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandar Khalipah	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandar Khalifah telah berjalan dengan baik sesuai regulasi mengenai BPJS Kesehatan pada UU No.24 Tahun 2004.
5	Suci Rahmadani, Nasrah Nasrah, Nurhayani Nurhayani, Muhammad Yusri Abadi, Dian Saputra Marzuki, & Ayu Bella Fauziah (2020)	Implementasi Sistem Rujukan Pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Pulau Barrang Lompo Makassar	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem rujukan pasien BPJS di Puskesmas Pulau Barrang Lompo telah sesuai SOP, sistem pencatatan dan pelaporan rutin dilaporkan, namun proses komunikasi pra rujukan belum berjalandengan baik
6	Effendi & M. Z. Babul Gaos (2019)	Implementasi Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kota Tangerang	Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Implementasi Program BPJS Kesehatan terkait kualitas kesehatan pelayanan di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang.

PEMBAHASAN

Bagian pembahasan berisi alasan yang menjelaskan hasil penelitian dan penelitian lain yang mendukung dan tidak sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh. **TIDAK DIPERBOLEHKAN** menggunakan kalimat yang sama dengan yang tercantum di bagian hasil dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** membaca ulang tabel dan grafik hasil analisis. Namun, hasil bisa dikelompokkan untuk diinterpretasikan dan dibahas berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi memiliki arti, sebuah pemerintahan yang berasal Dari rakyat, Oleh rakyat dan Untuk rakyat. Artinya, rakyat Indonesia lah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam konsep bernegara. Konsep ini menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik. Seperti yang telah diatur di dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 31 tentang pendidikan, pasal 33 tentang kekayaan alam, dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pelayan publik atau hak rakyat di dalam sebuah negara.

Dari sistem demokrasi Negara Republik Indonesia dan adanya UUD yang mengatur pedoman pelayanan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab yang menyeluruh dalam

implementasi pelayanan publik. Pemerintah Negara memiliki kewajiban dalam melayani setiap warga negara atau masyarakatnya dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui bentuk pelayanan publik, seperti yang telah diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945. Negara berkewajiban dalam memberikan pelayanan publik yang memadai, oleh karena itu pemerintah telah berupaya dengan melahirkan peraturan mengenai pelayanan publik yang diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang. Pemerintah membedakan bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, menjadi 3 jenis pelayanan, yaitu: pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang menciptakan berbagai macam bentuk dokumen resmi yang diperlukan oleh publik, seperti: status kewarganegaraan, penguasaan atau kepemilikan terhadap suatu aset, dan sebagainya. Sedangkan pelayanan barang merupakan pelayanan yang menciptakan jenis atau bentuk barang yang dipergunakan untuk keperluan publik, seperti: penyediaan air bersih, tenaga listrik, jaringan seluler dan sebagainya. Dan pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menciptakan bentuk jasa yang diperlukan oleh publik, seperti: pengelolaan transportasi, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam suatu negara, pelayanan publik dalam bentuk jasa seperti pemeliharaan kesehatan menjadi salah satu hal yang esensial dan perlu direncanakan dan dipikirkan dengan matang oleh pemerintah di suatu negara. Hal ini dikarenakan, pelayanan publik berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Dengan melakukan perbaikan terhadap tingkat kesehatan masyarakat maka secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerja SDM dalam suatu negara. Hal tersebut secara perlahan juga dapat mempersingkat laju pembangunan suatu negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban dalam memelihara kesehatan rakyatnya melalui pemberian pelayanan kesehatan yang tepat dan memadai.

Pelayanan kesehatan pada prinsipnya merupakan upaya atau kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat. Tujuan diadakannya pelayanan kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dan memenuhi derajat kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang efisien oleh penyedia pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif merupakan upaya yang kegiatannya lebih mengutamakan promosi kesehatan sedangkan pelayanan preventif merupakan upaya pencegahan penyakit dalam rangka menghindari masyarakat dari penyakit. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan masyarakat juga tertuju pada upaya-upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif) dan bukan hanya pengobatan individu yang sakit saja. Dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan secara baik ke pasien pengguna BPJS Kesehatan diharapkan pasien tersebut dapat memperoleh kepuasan pada pelayanan agar proses pelaksanaan program BPJS Kesehatan di suatu layanan kesehatan berjalan sesuai tujuan dari pelayanan kesehatan tersebut. Namun, pada proses pelayanan ke pasien BPJS Kesehatan terhadap upaya pengimplementasian program BPJS Kesehatan di suatu layanan kesehatan, tentu

saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dianalisis faktor pendukung dalam implementasi program BPJS antara lain adanya pemberian informasi terkait BPJS Kesehatan melalui poster dan spanduk yang berguna untuk masyarakat. Lalu, fasilitas yang tersedia cukup memadai dengan kualitas dan kuantitas yang juga memadai. Kesiapan dari fasilitas kesehatan tersebut telah memenuhi kriteria BPJS Kesehatan berupa kesiapan alat-alat kesehatan, kesiapan pada fisik bangunan suatu layanan kesehatan, serta kesiapan dari tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi dari badan BPJS Kesehatan. Kemudian, tersedianya fasilitas pendaftaran online, pihak BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa proses pengajuan klaim butuh waktu banyak dan rumit sehingga solusinya dengan menerapkan sistem aplikasi INA CBG's – SEP Integrated System (INASIS) yang diharapkan dapat mempercepat proses klaim dan menambah penguatan pada akurasi data untuk mencegah suatu double klaim (Hasrillah et al., 2021). Adanya tujuan serta kejelasan pada implementasi program BPJS Kesehatan dan tersedianya finansial yang telah memadai juga termasuk faktor pendukung dalam implementasi program BPJS Kesehatan dimana hal tersebut telah terlaksana di Rumah Sakit Islam Unisma Malang (Fajriansyah et al., 2022)

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dianalisis faktor penghambat dalam implementasi program BPJS yaitu miskomunikasi yang sering terjadinya. Masalah komunikasi pada suatu cara penyampaian yang kurang jelas dalam sosialisasi kepada masyarakat dan masih terdapat masyarakat yang kurang paham mengenai program BPJS Kesehatan sehingga kesalahpahaman antara masyarakat selaku penerima layanan dan tenaga kesehatan selaku pelaksana dapat terjadi. Kemudian, SDM (Sumber Daya Manusia) Kesehatan yang tidak memadai dan tidak kompeten di bidangnya. Hal tersebut menyebabkan proses pelayanan kesehatan ke pasien dapat terhambat serta memerlukan waktu banyak terhadap pasien. Masih belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus untuk menjalankan pelaksanaan program BPJS Kesehatan di suatu layanan kesehatan terutama di puskesmas juga termasuk faktor penghambat pada implementasi program BPJS Kesehatan.

KESIMPULAN

Dari enam artikel yang telah dianalisis dapat dikatakan program BPJS Kesehatan di Indonesia berjalan dengan baik di beberapa rumah sakit dan puskesmas di Indonesia. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapannya di beberapa rumah sakit dan puskesmas. Kendala yang paling sering di alami di rumah sakit dan puskesmas berupa jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dan adanya miskomunikasi antara aktivitas pelaksana dan organisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan optimalisasi dan evaluasi dalam penerapan BPJS Kesehatan di pelayanan kesehatan termasuk, puskesmas dan rumah sakit di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. Y., Marzuki, D. S., Arifin, M. A., Darmawansyah, Rahmadani, S., & Fajrin, M. A. (2019). Analisis Kepesertaan Mandiri BPJS Kesehatan di Sektor Informal (Studi di Kota Makassar).pdf. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 05(02), 114–124.
- Abuk, E. G., Suprojo, A., & Bagus, N. (2022). Efektifitas Program Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi di Bagian Umum dan Kepegawaian Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik).

- Afifah, T. N., Yusrani, K. G., Shabrina, R. S. N., & Istanti, N. D. (2022). Studi Literatur: Analisis Implementasi Kebijakan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 2(3), 113-121.
- Afrioza, S., & Baidillah, I. (2021). Hubungan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sepatan. *Journal of Nursing Practice and Education*, 1(2), 169-180
- Agustina, D., Sopang, A. S., Deviyanti, D., & Simanullang, S. M. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *ARRAZI: Scientific Journal of Health*, 1(1), 18-26.
- Angelita, M., Lukman, S., & Tahir, M. I. (2021). Inovasi Dan Efektivitas Pelayanan Melalui Mobile Jkn Pada Bpjs Kesehatan Di Jakarta Selatan. *Medium*, 9(2), 292-305.
- Anggraini, M. (2021). Kualitas Pelayanan Aplikasi E-Klaim Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Makassar (Studi Kasus Pt. Sari Agrotama Persada)(Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Apriliani, A., & Bawamenewi, V. A. (2024). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1303-1314.
- Apriliani, D. S., & Siregar, P. A. (2023). PENERAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS (PROLANIS) BPJS KESEHATAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS SIPEA-PEA SORKAM BARAT. *Jurnal Kesehatan*, 1(1), 118-127.
- Bakhri, S. (2023). PERAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA MENDATANG PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(3), 327-334.
- BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2021). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.
- Choiri Suhaila dan Ari Subowo, Skripsi berjudul "Implementasi Program BPJS Kesehatan" (Studi pada Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara,2017), Ilmu Administrasi Publik/Fisipol, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chumaida, Z. V., AS, B. S., Silvia, F., Usanti, T. P., & Aryatie, I. R. (2020). Kepesertaan Program Bpjs Kesehatan Di Tengah Wabah Pandemic Covid-19. *Lex Jurnal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Damanik, E. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Informal Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Djuarni, W., Mulyadi, D., & Agustina, T. (2021, October). Analisa Kinerja Pelayanan Publik Bidang Kesehatan pada Pelaksanaan Program BPJS Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) (Vol. 5, pp. 2781-2792)*.
- Ebing, E., & Febiansyah, M. (2024). KUALITAS PELAYANAN PROGRAM BPJS KESEHATAN PADA PUSKESMAS BOOM BARU KOTA PALEMBANG. *Governance Insight*, 1(1).
- Ebing, E., & Febiansyah, M. (2024). KUALITAS PELAYANAN PROGRAM BPJS KESEHATAN PADA PUSKESMAS BOOM BARU KOTA PALEMBANG. *Governance Insight*, 1(1).
- Effendi, E., & Gaos, M. B. (2019). Implementasi Program BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Tangerang. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2).
- Effendi, K. (2020). Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Uptd Puskesmas Mutiara Tahun 2019. *Excellent Midwifery Journal*, 3(2), 82-90.

- Fadhilah, D.A. et al. (2019). Hubungan antara Tingkat Pendapatan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Pasien Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 18(3), 98-101.
- FADLIA, D. (2023). EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SANGURARA KECAMATAN TATANGA KOTA PALU (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- Fajriansyah, M., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2022). Implementasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi Kasus tentang Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Unisma Malang). *Respon Publik*, 16(9), 85-92.
- Farhan Nurisqi, R., Winarti, N., & Putra, A. (2024). EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMBANTU KELURAHAN PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- GHOMAM, A. F. R. (2021). EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN (Dalam Pelayanan Instalasi Rawat Inap (IRNA) B Bawah) (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JATIM).
- Giati, L. M. (2022). EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS GAMBUT KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Gusnita, A., Rakhmadani, S., & Mulyono, J. (2023). KESETARAAN LAYANAN BPJS KESEHATAN BERBASIS MODEL EVALUASI PROGRAM IKEP RSUD AHMAD YANI KOTA METRO. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 80-96.
- Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2023). ALOKASI DASAR DAN KETENTUAN SOSIAL PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN DI PROVINSI JAWA BARAT. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 37-45.
- Hairat, N., & Suyuti, M. G. (2020). Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 di Puskesmas Segeri. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYAH*, 1(3), 594-601.
- Halima, N. H. (2024). Indonesia IMPLEMETASI PROGRAM BERKAS PELAYANAN JALAN SENDIRI BANGKIT (BPJS BANGKIT) SEBAGAI BENTUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 6(1), 24-31.
- Hamrana, H., Mahsyar, A., & Sudarmi, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1128-1139.
- Hardianto, W. T., Rohman, A., & Amaral, I. G. (2022). Standar Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Dinoyo Kota Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Hariyoko, Y., Jehaut, Y. D., & Susiantoro, A. (2021). Efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat oleh puskesmas di kabupaten manggarai. *Jurnal Good Governance*.
- Hasibuan, Rapotan. *Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat*. Penerbit NEM, 2021.
- Hasrillah, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program BPJS Kesehatan (Studi pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2869-2882.
- Indah, N. (2023). ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 606-615.
- Irawan, B., & Ainy, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan

- Pelayanan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja Puskesmas Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 189–197.
- Iswanto, I., Sudarmi, S., & Parawangi, A. (2020). Kualitas Pelayanan Di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 574-588.
- JUNI HARDI, R. I. Z. K. I. A. W. A. N. (2023). ANALISIS YURIDIS PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (JKM) PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Juniarto, M., Subandi, O. U., & Sujarwo, S. (2022). Edukasi Olahraga Dalam Upaya Meningkatkan Kebugaran dan Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, 20(1), 16-23.
- Kholivah, S. (2022). Implementasi Pelayanan Publik Bidang Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kolonel Abundjani Bangko Kabupaten Merangin (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Krisdayanti, W. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 1–98.
- Kusuma, D. (2020). PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA DALAM PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- La Dimuru, A. H., & Rumau, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Puskesmas Kecamatan Geser Kabupaten Seram Bagian Timur). *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(2), 15-23.
- Larasati, D., & Nurmawaty, D. (2022). Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Non Racikan Pasien Program Rujuk Balik (PRB) BPJS Kesehatan di Apotek Kimia Farma Karang Tengah Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 1(3), 1-11.
- Lende, D. N., Sirait, R. W., & Dodo, D. O. (2021). Media Kesehatan Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Media Kesehatan Masyarakat. *Media Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 19–28.
- Maryuni, S., Pardi, P., & Eka, A. (2020). Strategi Implementasi Program Perluasan Kepesertaan Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(2).
- Meilina, N. W., & Purwanto, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 6769-6777.
- Napitupulu, D. B., Panjaitan, M., & Pasaribu, V. A. (2023). The Effectiveness of The BPJS Employment Old Age Security Program in an Effort To Improve The Welfare of The Working Community in Medan City. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 4(2), 111-119.
- Nasution, I. F. S., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2021). Analisis pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(4), 527-532.
- Ningtias, E. D. H. (2022). Analisis Pelaksanaan Program JKN-BPJS dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Puskesmas Ajung Kabupaten Jember Tahun 2021. *BIO-CONS: Jurnal Biologi dan Konservasi*, 4(2), 131-141.
- Non BPJS Kesehatan Stabat, Langkat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (2), 1008–1016.
- Novita, L., & Anggraeni, D. D. (2023). EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN DI

- PUSKESMAS. *Mimbar Administrasi Mandiri*, 19(2), 149-158.
- Nughara, & Hendy, F. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Revolusi Indonesia*. Upn, Ventera Jawa Timur. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), 951–952.
- Nur Intan Ayuningsih, I. (2023). Implementasi Program Bpjs Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Kusuma Husada Surakarta).
- Nurdiana, O. L., Menap, M., Khalik, L. A., Budiharjo, N., & Sismulyanto, S. (2022). Tingkat Kepuasan Keluarga Pasien Rawat Inap Peserta Program BPJS Kesehatan Berdasarkan Status Kepesertaan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), 723-730.
- Nurhamidah, N., & Susilawati, S. (2022). Analisis implementasi program BPJS kesehatan di puskesmas Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(6), 460-463.
- Nurzannah, M., Nurhamidah, N., Purba, L. A. C. B., & Gurning, F. P. (2022). Implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandar Khalipah. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2927-2930.
- Pakpahan, Martina, et al. "Pengantar Kesehatan Masyarakat." (2022).
- Pane, M. (2019). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 2 (1).
- PERAN TENAGA KESEHATAN DI RS BUDI SETIA LANGOWAN TAHUN 2023 BERDASARKAN HOSPITAL SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE (HSOPSC). *PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 8(2), 2654–2668
- Permatasari, A. A., Lolita, D. C., & Chotimah, C. C. (2023). Peran Media Digital Dalam Upaya Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Tinjauan Literatur. *Zaitun (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 11(1), 1-4.
- Pratiwi, P. D., Fauzi, A., Gumelar, P. P., Ramdhani, R., Sasono, A., & Asmoroningtyas, T. (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(6), 768-777.
- Putri, A., Lubis, F. A., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota
- Putri, U. A., Diana, D., & Bazarah, J. (2022). Efektivitas Pelayanan Preventif dan Rehabilitatif Pada BPJS Kesehatan Terhadap Masyarakat. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(2), 384.
- Rahmadani, S., Nasrah, N., Nurhayani, N., Abadi, M. Y., Marzuki, D. S., & Fauziah, A. B. (2020). Implementasi Sistem Rujukan Pasien BPJS Kesehatan Di Puskesmas Pulau Barrang Lompo Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 6(2), 223-236.
- Rahmah, D. A. A. (2022). Sistem Pengelolaan yang Diterapkan pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-12.
- Rahmiyati, A. L. (2021). *Buku Ajar Konsep Dasar Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan*. Malang: Ahli Media Press.
- Ramadhan, F., Muhafidin, D., & Miradhia, D. (2021). Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ibum Kabupaten Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 58-63.
- Reimond, R., Khalik, A., & Imrab, B. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN GRATIS (BPJS) DI PUSKESMAS MAMASA KABUPATEN MAMASA. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 187-204.
- Ridhani, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan

MAB).

- Ritonga, F., Kinanti, W., Munthe, S., & Gurning, F. P. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM BPJS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Kesehatan*, 2(1), 12-20.
- Riza, M. (2023). THE EFFECTIVENESS OF THE BPJS HEALTH PROGRAM IN ADDRESSING HEALTH PROBLEMS IN INDONESIA. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 803-808).
- Rizkyah, R. A., & Fauziah, S. (2024). Penerapan Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 6(1), 463-466.
- Rosita, S., Arina, A., & Muhazar, M. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit TK II Iskandar Muda Banda Aceh. *Serambi Sainia: Jurnal Sains dan Aplikasi*, 9(2), 112-119.
- ROTASOUW, L., LENGKONG, F., & PLANGITEN, N. (2022). PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN BPJS DI PUSKESMAS BARABARAYA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(117).
- Salangka, A. R. (2023). Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dilihat Dari Hukum Administrasi Negara. *Lex Privatum*.
- Samad, A. W., & Hasibuan, A. N. (2022). Mencari Formula Program Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 2(2), 139-158.
- Saputra, M. A., & Musyafah, A. A. (2023). Kewajiban Penyertaan Kartu BPJS Kesehatan Pada Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan dalam Rangka Optimalisasi Program BPJS (Studi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan). *UNES Law Review*, 6(1), 1177-1186.
- Sari, A., & Yeni, R. (2022). Kajian Implementasi Program Rujuk Balik Di BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan Tahun 2021: Study on the Implementation of Referback Programs at BPJS Kesehatan South Jakarta Branch in 2021. *Indonesian Scholar Journal of Medical and Health Science*, 1(07), 236-249.
- Sari, I. P., Lubis, F. A., & Tambunan, K. (2024). Analisis Efektivitas Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 512-521.
- Sathya, Y. S., Syamsiah, D., & Putri, F. A. W. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PT SARI WARNA ASLI GARMENT SURAKARTA. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2525-2532.
- Shofia, A. K. I., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Pada Puskesmas Tanjungnom Kabupaten Nganjuk). *Respon Publik*, 14(2), 24-34.
- Silvia, & Lubis, F. A. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Pada Peserta BPJS Kesehatan
- Simbolon, G. A. H., Nasrullah, N., Simanullang, P., Bernadetha, B., & Raule, J. H. (2023). Analysis of Health Services Based on the BPJS Program in Hospitals. *Jurnal eduhealth*, 14(02), 1036-1040.
- Siringoringo, M. (2022). Efektivitas pelayanan kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Puskesmas Tigaurung Kecamatan Pamatang Sidamanik (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sitompul, J. M. T. (2022). The Effectiveness Of The Implementation Of The BPJS Health Program In Providing Services To Weak Economic Communities (Study At Helvetia District Health Center, Medan). *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 12(2), 37-42.
- Suparti, H. (2023). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Pada Poli Kesehatan Ibu & Anak Di Puskesmas Bintang Ara. *Japb*, 6(2), 574-584.

- Suranto, D., Suryawati, C., & Setyaningsih, Y. (2020). Analisis Budaya Keselamatan Pasien pada Berbagai Tenaga Kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 8(1).
- Suryandartiwi, W., Salim, A., & Purnamasari, D. (2020). Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Masyarakat Di Sialang Mungu Pekan Baru. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 41-43.
- Susanti, F. (2020). Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) Di Kota Magelang.
- Sutoro, S., Subagia, D., & Mulyono, D. (2023). EFEKTIFITAS PELAYANAN PUSKESMAS SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN PERTAMA DALAM PROGRAM BPJS DI PUSKESMAS KARAWACI BARU. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1017-1028.
- Syamsuriansyah, S., Qudsi, J., Andriani, H., Charunnisa, R., Hasanah, U., Ulfah, M., & Syamsuriamin, S. (2023). PEMANFAATAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU NTB. *Unram Medical Journal*, 12(1), 1272-1282.
- Tambunan, R. (2020). Upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Hari Tua Kepada Pekerja Informal di Kota Medan (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Thaib, D., & Samad, A. W. (2021). Evaluation of social security of BPJS KESEHATAN program. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(7), 718-732.
- Trisna, W. V., Daniati, S. E., & Sari, T. P. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Primary Care (P-Care) BPJS Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Se-Kota Pekanbaru dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM). *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 3(2), 152-161.
- Ulkhofifah, N. (2022). Implementasi program jaminan hari tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilandak (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Wahyuni, F. (2021). Efektivitas pelayanan jaminan kesehatan berbasis teknologi mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 3(3), 377-384.
- Windari, N. K. A. I., Putra, I., & Astariani, P. S. P. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Yuniar, W. A. (2022). EFEKTIVITAS PELAYANAN BAGI PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI PUSKESMAS BATUAN SUMENEP (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja Madura).
- Zulfita, E., & Syarvina, W. (2022). Analysis of the Implementation of the Work Accident Insurance Program at the Office of BPJS Ketenagakerjaan, Binjai Branch. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 1(2), 217-220.